

MEDIA KALTIMTARA

RABU,
15 NOVEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



RUMUSKAN KEBIJAKAN ATASI ANJLOKNYA HARGA RUMPUT LAUT

BACA HALAMAN 2



GUBERNUR ZAINAL: PERLU
SINERGITAS BERANTAS OBAT
DAN MAKANAN ILEGAL

BACA HALAMAN 12



ADE/MKR

Petani sedang menjemur rumput laut.

Rumuskan Kebijakan Atasi Anjloknya Harga Rumput Laut

TARAKAN - Wali Kota Tarakan, Khairul merumuskan sejumlah kebijakan guna mengatasi anjloknya harga rumput laut. Kebijakan itu dirumuskan usai Khairul melakukan pertemuan dengan Rakyat Pesisir, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kaltara, Wakil Ketua II DPRD kota Tarakan, para pengusaha serta instansi vertikal terkait lainnya di Gedung KNPI kota Tarakan pada Jumat (10/11/2023) lalu.

Khusus untuk persoalan bibit, kata Khairul, Pemkot Tarakan berencana akan membuat kebun bibit. Tidak hanya itu, bibit yang nantinya digunakan para petani akan diseleksi oleh

enam balai. Sehingga harapannya, bibit yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

“Direncanakan akan membuat kebun bibit. Katanya sudah ada di Tanjung Pasir. Namun itu tidak cukup sehingga berencana bikin satu lagi. Nanti bibitnya di ambil dari enam balai. Kemudian diseleksi, dikembangkan dan disesuaikan mana yang cocok dipakai di Tarakan,” ucap Khairul, Senin (13/11/2023).

Terkait cara pengelolaan, pihaknya akan melakukan pembimbingan kepada para petani rumput laut. Pembimbingan nantinya akan dilakukan oleh perguruan tinggi UBT serta

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). “Nantinya diajari bagaimana mengelola yang baik sehingga kualitas dan harganya bagus,” papar Khairul.

Selanjutnya, pihaknya juga akan membangun resigudang untuk mengatasi persoalan produksi rumput laut yang melimpah namun permintaan menurun.

Dijelaskannya, resi gudang digunakan untuk menampung rumput laut para petani. “Rumput laut ini disimpan dan sambil menunggu harga bagus. Jadi semacam gudang Bulog. Jadi gudang itu, kalau harga sudah bagus barulah rumput laut dikirim,” ucapnya.

Khairul menargetkan dalam waktu dekat akan melakukan MoU dengan perumda agrobisnis untuk mengelola aset resi gudang.

“Insyaallah dalam Minggu ini MoU dengan perumda agrobisnis yang sekaeang mengelola aset untuk resi gudang. Yang pabrik rumput di Pantai Amal yang mau dijadikan resi gudang. Estimasi kita Minggu ini bisa ditandatangani MOU itu dan segera ditin-

dakkanjuti. Mudah mudahan harga rumput laut bisa naik,”ucapnya.

Dia menyebut Pemkot Tarakan telah membuat solusi jangka pendek dan panjang guna mengatasi anjloknya harga rumput laut.” Yang dijelaskan tadi Ini kan jangka pendek dan jangka panjang juga akan disiapkan,”katanya.

Solusi jangka panjang yang tengah disiapkan adalah dengan membangun

pabrik pengelolaan. Tempat ini digunakan untuk mengelola rumput laut menjadi berbagai bahan olahan. “Nanti tidak hanya menjual rumput laut bentuk mentah. Nanti ada diolah bisa untuk pupuk ataupun lain sebagainya. Ini planning jangka panjang sehingga harga bisa terjaga,”katanya.(apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

Khairul Ungkap Penyebab Anjloknya Harga Rumput Laut di Tarakan

TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan mengadakan pertemuan dengan Rakyat Pesisir, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kaltara, Wakil Ketua II DPRD kota Tarakan, para pengusaha serta instansi vertikal terkait lainnya di Gedung KNPI kota Tarakan pada Jumat (10/11/2023) lalu. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi warga pesisir sekaligus mencari penyebab dan solusi terkait permasalahan anjloknya harga rumput laut.

Wali Kota Tarakan, Khairul mengungkapkan, dari pertemuan tersebut, terungkap sejumlah penyebab anjloknya harga rumput laut di Tarakan. Dijelaskannya, persoalan anjloknya harga rumput laut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang pertama berkaitan dengan persoalan bibit.

Menurut analisa dari pihak Universitas Borneo Tarakan (UBT), dinas terkait serta pelaku usaha diketahui bahwa bibit yang pakai para petani digunakan secara berulang-ulang. Alhasil, kualitas rumput laut yang dihasilkan tidak maksimal. “Kalau dibanding dengan harga normalnya di Nunukan dengan Tarakan, harga di sini memang lebih di bawah bisa selisih Rp 3 ribu. Salah satu penyebab yang kami tangkap, karena persoalan bibit ini,” kata Khairul, Senin (13/11/2023).

Persoalan internal lainnya yang menyebabkan harga rumput laut anjlok adalah cara pengelolaan. “Kalau di Nunukan itu menjemurnya di gantung, kalau di Tarakan dihempas sehingga bercampur lah dengan kotoran ayam dan lain lain. Itu dari cerita mereka. Artinya pengelolaan juga harus dibaiki,” tegas Khairul.

Selanjutnya, disebabkan karena faktor eksternal. Menurutnya, saat ini harga rumput laut memang sedang turun. Kendati demikian, dia tak menampik jika harga di Tarakan sudah jauh menurun

Khairul menyebut hal ini terjadi karena banyak pengepul yang harus dilalui para petani sebelum menjual rumput lautnya sehingga harga harus terpotong. “Banyak sekali rantai yang harus dilewati sebelum sampai ke pabriknya. Banyak sekali rantainya, istilahnya peluncur atau pengepul sehingga harga banyak di potong,” kata Khairul.

Khairul mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin aspirasi yang disampaikan oleh warga yaitu mengenai percepatan pengembangan rumput laut, iklim persaingan yang sehat, pembubaran asosiasi,

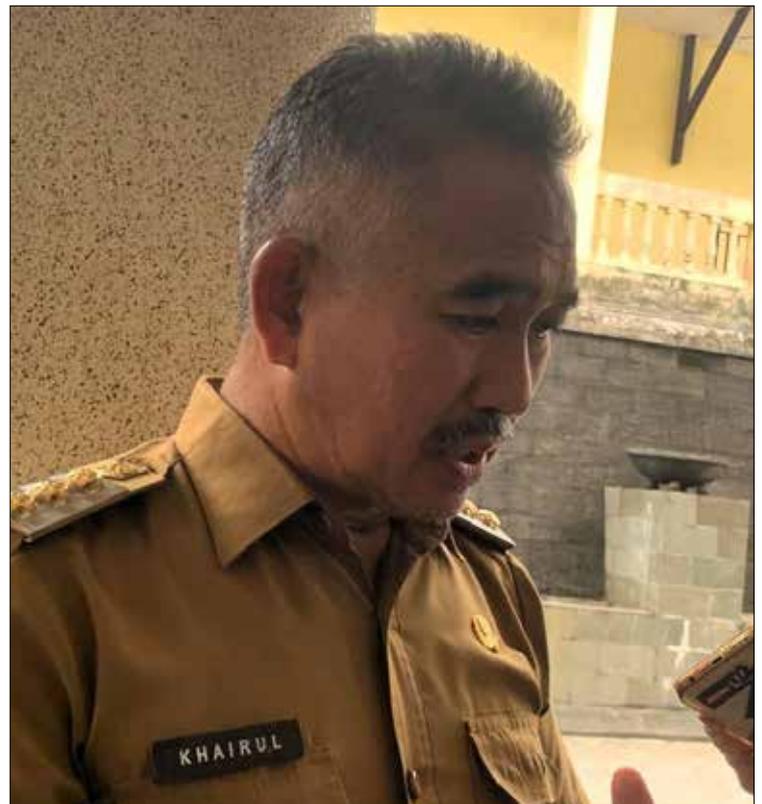
regulasi tata niaga, penundaan kredit, perbaikan jalan, penegakan hukum terkait pencemaran limbah, hingga satgas percepatan stabilisasi harga rumput laut.=

Dia pun berjanji akan membantu stabilitas harga rumput laut dengan membentuk satgas. “Satgas nanti akan dibentuk yang fungsinya untuk stabilitas harga rumput laut,” ungkap orang nomor satu di Kota Tarakan ini.

Kendati demikian, dirinya mengatakan bahwa saat ini harga rumput laut di Tarakan berada di kisaran Rp 7-8 ribu. “Sebenarnya standar normal itu harga rumput laut Rp15 ribu. Kalau bagus-bagusnya Rp25 ribu. Sekarang di level petani Rp 7 atau 8 ribu,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Wali Kota Tarakan, Khairul



Pembangunan Oprit Jembatan terus Berprogres.

Pengerjaan Oprit Jalan Salimbatu Dikebut

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (DPUPR), terus menggenjot pembangunan oprit Jembatan di Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Kepala DPUPR Bulungan, Khairul saat dikonfirmasi menjelaskan, pekerjaan pembangunan oprit Jembatan Salimbatu, terus berprogres. Saat ini, kata dia pengerjaan di lokasi berupa pemasangan rangka besi. “Kendala yang ditemukan, dalam hal distribusi material jenis bebatuan yang harus didatangkan dari luar Kalimantan,” ucap Khairul, Selasa (14/11/2023).

Dia melanjutkan, setelah material batuan tiba. Pekerjaan akan dilanjutkan berupa pengecoran. Kalau sudah pengecoran, diprediksi progres pembangunan bisa mencapai di angka sekitar 80 persen. “Dengan sisa waktu yang ada, kita optimistis pengerjaan itu dapat rampung se-

belum akhir tahun,” ucapnya.

Proyek pembangunan oprit jembatan tersebut, menelan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2023. Jika dihitung berdasarkan masa kontrak, pengerjaan itu bakal rampung sampai pada 31 Desember 2023. “Kita terus mendorong, supaya pengerjaan fisik bisa rampung sebelum jatuh tempo berakhir,” tuturnya.

Sebelumnya, dia menegaskan bahwa selama pekerjaan, akses untuk kendaraan roda empat dialihkan melalui Kelubir-Karang Agung-Salimbatu. Sementara, kendaraan roda dua bisa menggunakan angkutan sungai atau perahu tambangan yang disiapkan oleh pihak kontraktor.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menuturkan pemerintah terus fokus pembangunan infrastruktur jalan dengan kategori rusak parah, dan akses fital masyarakat.

Seperti jalan poros Salimbatu, dengan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah.

“Kita terus membenahi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan total, untuk pembangunan dilakukan bertahap,” ujar Syarwani.

Soal progres pengerjaan jalan Salimbatu, diproyeksikan telah mencapai 47,8 persen. Seiring berjalannya waktu, progres pengerjaan itu di lapangan terus berjalan artinya angka itu tidak konsisten tapi alami perubahan dengan pengerjaan yang terus digenjut.

Saat ini, pengerjaan jalan Salimbatu dalam tahap pekerjaan lapis pondasi agregat (LPA). Setelah itu, dilanjutkan dengan pengaspalan. Pengaspalan, diperkirakan tidak memerlukan waktu lama, dimungkinkan jika didukung dengan cuaca yang membaik hanya diperlukan waktu selama dua pekan. (adv/tin/and)



Bupati Bulungan, Syarwani saat tinjau pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Palas.

Bangun Kantor Kelurahan Lebih Representatif

TANJUNGSEROR - Memasuki akhir tahun 2023, pemerintah kabupaten Bulungan terus genjot pembangunan di bidang infrastruktur. Salah satunya, pembangunan kantor kelurahan Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani berkesempatan untuk meninjau ke lapangan, soal progres pembangunan kantor kelurahan di dua Kecamatan tersebut.

"Kita berharap, adanya bangunan kantor kelurahan yang lebih representatif, dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat," ungkap Syarwani, Selasa (14/11/2023).

Perlu diketahui, pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Palas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023, senilai Rp 3.752.495.889. "Hasil tinjauan tadi, progres pembangunan kantor kelurahan tersebut telah mencapai 60 persen," tukasnya.

Sedangkan, pembangunan rehabilitasi berat kantor Kelurahan Ka-

rang Anyar dialokasikan lewat APBD tahun 2023, senilai Rp 3.574.689.449. "Progresnya telah mencapai 80 persen, hampir rampung," tukasnya.

Pemerintah optimistis, pembangunan dua kantor kelurahan terse-

but, dapat selesai pembangunannya sebelum akhir tahun 2023. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk konsistensi pemerintah demi kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat. (adv/tin/and)





Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalambang

Perhatikan Kesehatan Anak, Imbau Orangtua Berikan Vaksin HPV

TANJUNG REDEB - Pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak perempuan berusia 9 hingga 14 tahun sangat penting untuk mencegah serangan kanker serviks.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalambang mengungkapkan, orangtua harus memperhatikan kesehatan sang anak. Sehingga, vaksin harus diberikan sebelum terpapar virus HPV.

"HPV ini merupakan penyakit yang dapat menular. Jadi, saya imbau para orang tua untuk memberi vaksin terhadap anak perempuannya," ung-

kapnya.

Ia menilai, sosialisasi mengenai pentingnya vaksin HPV tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan (Nakes), tetapi juga pihak sekolah dan lembaga lainnya. "Tetapi saya kira, lebih bagus jika semua masyarakat ikut menyampaikan informasi ke masyarakat. Khususnya yang masih ada salah pemikiran soal vaksin," ujarnya.

Salah satu lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menurut Ratna, UKS bisa menjadi medium

untuk meluruskan informasi terkait vaksin HPV ke para siswa perempuan dan orangtua mereka.

Namun, Politikus Golkar ini berharap agar sosialisasi bisa dijalankan untuk semua pihak. Sebab dinilainya, masih sedikit yang mengetahui pentingnya vaksin HPV.

"Vaksin HPV ini sangat bermanfaat untuk mencegah kanker serviks yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Saya harap orangtua bisa sadar demi kesehatan anak-anak mereka," pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

Masyarakat Harus Waspada terhadap Bahaya TBC

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyakit Tuberkulosis (TBC). Dia mengungkapkan, TBC merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Rudi mendorong pemerintah melakukan pencegahan dan pengobatan.

“Penyakit TBC ini bisa menimpa masyarakat dari berbagai kalangan. Jika salah satu anggota keluarga terkena TBC, secara perlahan-lahan ekonomi keluarga akan hancur, karena tidak bisa bekerja,” katanya.

Menurut Politikus PDI-P ini, edukasi dari pemerintah sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Ditambahkannya, pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan di tingkat bawah, seperti puskesmas, untuk membantu masyarakat yang terinfeksi penyakit TBC.

“Peran Puskesmas sangat penting. Obat TBC itu akan diberikan selama enam bulan, kemudian pemerintah akan mengontrol dampak positifnya,” tandasnya. (adv/and)

Atasi Dampak El Nino ke Sektor Pertanian, Pemerintah Harus Segera Siapkan Program Alternatif

TANJUNG REDEB - Fenomena El Nino mengancam sektor pertanian di Kabupaten Berau. Dampaknya, belakangan ini produksi petani dikabarkan menurun. Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah mengungkapkan, untuk mengatasi penurunan produksi petani akibat El Nino, pemerintah harus segera menyiapkan program alternatif.

“Program yang disiapkan harus dapat mengatasi masalah para petani yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi dampak El Nino yang dapat mengganggu ketahanan, dibutuhkan koordinasi dan sinergi semua pihak. “Meski sudah ada program yang dibuat Kementan, tetapi program itu saya rasa belum cukup untuk mengatasi masalah petani. Buktinya, belakangan ini produksi petani kita menurun,” bebernya.

Menurutnya, agar penurunan produksi padi teratasi, pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air. “Misalnya mengadakan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air dari sumber-sumbernya. Hal itu sudah sebagai wujud pemerintah dalam membantu petani,” jelasnya.

Kendati demikian, dirinya juga menyarankan pemerintah membuat sumur, bendungan atau mata air yang kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah. “Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir,” pungkasnya. (adv/and)



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah

APBD Berau 2024 Harus beri Dampak Positif ke Dunia Pendidikan



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2024 mendatang menyentuh Rp 4 triliun. Maka dari itu, sektor pendidikan harus lebih diperhatikan.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, cukup besarnya APBD 2024 nanti harus mampu menuntaskan permasalahan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal.

"Pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tetapi saya prihatin dengan kondisi pendidikan di beberapa kampung," ungkapnya.

Dia membeberkan, sektor pendidikan yang ada di wilayah pedalaman atau perkampungan Berau, memiliki sejumlah kekurangan. Seperti jumlah guru dan fasilitas yang kurang memadai.

"Saya harap Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten dapat memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai dunia pendidikan kita buruk," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini berharap, APBD Berau tahun 2024 mendatang membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

"APBD tersebut harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (adv/and)

SDM Harus Tingkatkan Daya Saing untuk Pengaruhi Angka Kemiskinan

TANJUNG REDEB - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Ia menuturkan, peningkatan SDM merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. "Jika SDM di suatu daerah baik, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan ikut baik," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, kemiskinan akan berdampak negatif ke beberapa hal, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas serta kerusakan lingkungan.

"SDM kita harus meningkatkan daya saing, agar tidak kalah dengan daerah lain. Pemerintah harus ikut andil mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan SDM sebagai kunci menghapus kemiskinan dan ketimpangan," ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Baik itu melalui membuka lapangan kerja dan sebagainya. "Apalagi dengan adanya IKN ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya harap SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.

Kendati demikian, Syarifatul menganggap perlu keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan yang ada di Bumi Batiwakkal, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. "Perusahaan yang ada juga harus konsisten memberi bantuan atau hak serupa terhadap masyarakat sekitarnya," pungkasnya. (adv/and)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah



Monev dikomando langsung oleh DKUKMPP Bulungan.

Pedagang Eceran, Jual Gas Melon Diatas HET

TANJUNG SELOR - Tim gabungan, yang dikomandoi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bulungan, gelar monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah titik pangkalan liquefied petroleum gas (LPG), di Tanjung Selor, Selasa (14/11/2023).

Hasil dari monev tersebut, didapati sejumlah izin pangkalan dengan masa berlaku yang telah habis dan belum dilakukan perpanjangan. Prosedur perizinan tersebut, bisa diperpanjang melalui online single submission (OSS).

Kepala DKUKMPP Bulungan, Errin Wiranda saat dikonfirmasi menjelaskan di tingkat pangkalan, sejauh ini penjualan LPG masih sesuai harga

eceran tertinggi (HET), di wilayah Tanjung Selor yakni dijual seharga Rp 26 ribu per tabung.

"Iya, di pangkalan hasil monev kita hari ini, masih menjual LPG 3 kilogram sesuai HET. Hanya saja, tingkat eceran menjual diatas harga tersebut," ujarnya.

Terhadap pangkalan yang menjual gas melon diatas harga HET, maka akan diberikan sanksi langsung dari agen. "Kita tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pangkalan tersebut," kata dia.

Dalam hal ini, masyarakat diimbau untuk tidak membeli di eceran. Sebab, harga jual melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Mengantisipasi hal tersebut, pembelian gas LPG bakal menggunakan kartu tanda penduduk

(KTP). Kebijakan itu dikeluarkan, bertujuan untuk memastikan penyaluran gas melon ini tepat sasaran.

Hanya saja, kebijakan ini belum diimplementasikan di Bulungan, karena masih dalam tahap pendataan oleh agen. Nantinya, pendistribusian LPG hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdata. "Sementara masih dilakukan pendataan," tuturnya.

Penerapan pembelian LPG menggunakan KTP mulai berlaku Januari 2024 mendatang. Dengan kebijakan itu, diharapkan penyaluran dan distribusi gas melon tepat guna, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

(tin/and)

Editor: Andhika

Masih Jadi Polemik, Soal Kompensasi untuk Warga Terdampak Pencemaran Limbah

TANJUNG SELOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bulungan, memberikan sejumlah rekomendasi ke Pemkab Bulungan. Berkaitan adanya dugaan pencemaran limbah oleh PT Lamindo Inter Multikon yang beroperasi di Kecamatan Bunyu, Bulungan. Rekomendasi dikeluarkan, berdasarkan hasil rapat paripurna ke-7 masa sidang III, pada Senin (13/11/2023).

Kepada wartawan, Ketua DPRD Bulungan, Kilat mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antar warga dengan pihak perusahaan. Namun, tidak menemukan kata sepakat. Sehingga, pansus memutuskan untuk turun lapangan.

Ini bertujuan, untuk memastikan kondisi di lapangan apakah sesuai dengan laporan masyarakat. Kemudian dilakukan upaya mediasi kedua. "Namun, belum menemukan titik temu. Bahkan, perusahaan bersikeras dengan bermacam alasan," ujar Kilat.

Kata dia, Masyarakat Bunyu meminta perusahaan untuk membuat irigasi pembuangan air limbah. Sementara, lahan yang terdampak. Warga meminta kebijakan perusahaan untuk diberikan kompensasi atau ganti untung.

Tapi perusahaan enggan merealisasikan. Dengan beralasan sudah memberikan kompensasi kepada warga sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga (KK).

Namun, kompensasi itu diberikan sebelum terjadi pencemaran limbah. Bahkan, sampai saat ini perusahaan belum membangun saluran irigasi pembuangan air limbah. Akibatnya, tanam tumbuh milik warga banyak yang mati.

Karena tidak menemukan titik terang. Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemda Bulungan. Pertama, merekomendasikan Bupati Bulungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera lakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap pihak perusahaan.

Selanjutnya, pemerintah diminta segera menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat. Khususnya pemilik lahan di Sungai Barat Desa Bunyu Barat yang terkena dampak.

DPRD Bulungan minta Pemda Bu-

lungan, segera menerapkan sanksi administratif, kepada penanggung jawab usaha atas kegiatan perusahaan. Jika dalam pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran terhadap izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemkab Bulungan diminta segera melakukan koordinasi kepada Pemprov Kaltara dan pusat terkait dugaan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, pansus merekomendasikan kepada pos penegakan hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Kalimantan supaya segera menindaklanjuti laporan masyarakat, yang lahannya terkena dampak pengelolaan limbah.

"Kalau ada permasalahan segera diambil tindakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan," ungkapnya.

Ketiga, untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya pencemaran, Pansus merekomendasikan kepada masyarakat. Khususnya pemilik lahan yang terdampak untuk segera, secara tertulis melaporkan dugaan pencemaran kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Bulungan, Jamal memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diserahkan oleh Pansus. "Setelah ini, kita sampaikan ke Bupati," singkatnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Ketua DPRD Bulungan Kilat



Antrean Mengular, Distribusi Tersendat

TANJUNGSEROR – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bulungan, melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Selor, Selasa (14/11/2023). Dari hasil monitoring DKUKMPP Bulungan, ditemukan kendala distribusi BBM Jenis solar, permium dan pertalite di SPBU Jalan Katamso.

“Iya, itu menjadi kendala yang kita temukan dari hasil monitoring,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bulungan, Errin Wiranda.

Dikatakan, SPBU ini merupakan perizinan langsung dari Pertamina. Sebagai bentuk pengawasan di daerah, pihaknya melaksanakan monitoring dan evaluasi guna mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Dari hasil monitoring tersebut, kata dia, hasilnya akan diteruskan juga kepada pihak Pertamina. “Iya, hasil monitoring dan evaluasi ini, kita teruskan juga ke Pertamina,” tuturnya.

Soal kurangnya distribusi BBM tersebut ke SPBU, kata dia akan dikroscek kembali. Terutama kepada Pertamina penyalur dari Berau, Kaltim. “Jadi, nanti kami akan kroscek lagi ke Pertamina Berau, apa yang menjadi kendala, kalau pihak SPBU tadi menjelaskan alasan kendaraan yang rusak, dan ini akan dikroscek kembali,” jelasnya.

Sedangkan, untuk SPBU Jalan Sa-

banar Lama, DKUKMPP Bulungan mengapresiasi karena dalam hal pembelian BBM menggunakan scan barcode.

“Alhamdulillah, bebe merekaa SPBU yang ada di Bulungan menerapkan barcode dalam pengisian BBM. Karena, itu merupakan arahan yang disampaikan oleh pihak Pertamina. Bahwa dalam penjualan tiap hari harus ada batas minimal dan maksimal,” tukasnya.

Melalui barcode, pengisian akan terintegrasi melalui sistem, sehingga dalam hal pengisian tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Smentara itu, pengawas SPBU Sa-

banar Lama Angga saat dikonfirmasi menjelaskan antrean panjang yang terjadi didominasi kendaraan dari luar Bulungan, yang mengantar bahan pokok ke Bulungan.

Sedangkan, untuk pengisian BBM tetap di batasi setiap kendaraan roda empat yang masuk. Batas maksimal, jika dikalkulasikan ke rupiah untuk kendaraan jenis truk batas maksimal mencapai Rp 500 ribu. Sedangkan, kendaraan kecil sekitaran Rp 300 ribu.

“Iya, jika di hitung per liter kurang lebih sekitar 70 liter, untuk tiap jenis kendaraan,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Monitoring dan Evaluasi, sejumlah SPBU di Tanjung Selor.



ADE/MKR

Gubernur Zainal bersama Kepala Balai POM Tarakan, Herianto Baan saat melihat produk makanan dan minuman ilegal.

Gubernur Zainal: Perlu Sinergitas Berantas Obat dan Makanan Ilegal di Kaltara

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang mengatakan perlu sinergitas bersama stakeholder terkait untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal. Hal itu dia sampaikan kala menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pemberantasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal yang diselenggarakan BPOM, di Hotel Royal Tarakan, Selasa (14/11/2023).

"Tidak bisa hanya satu instansi saja yang menangani permasalahan ini. Permasalahan ini sudah lama dan kita fokuskan kepada makanan dan minuman, kosmetik yang mengandung obat ataupun bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tubuh manusia yang berakibat pada kematian," ujar Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Selasa (14/11/2023).

Menurut Zainal, memberantas peredaran obat dan makanan ilegal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh para penjual. Untuk itu, Gubernur Zainal berharap para penjual lebih selektif dalam menjual makanan dan minuman serta obat-obatan.

Zainal menilai pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi serta penindakan agar tidak membahayakan bagi masyarakat di Kaltara. Dia berharap melalui FGD yang dilakukan ini dapat menghasilkan keputusan yang baik.

"Mudahan-mudahan instansi dan stakeholder yang terlibat dalam hal penanganan ini bisa menghasilkan putusan yang baik untuk penanganan," ungkapnya.

Diharapkan juga, FGD nantinya

dapat membentuk tim untuk penanganan peredaran obat dan makanan ilegal di Kaltara.

"Apakah dibentuk tim terpadu. Saya kira itu sangat perlu supaya masyarakat kita tidak mengonsumsi bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan," katanya.

Saat disinggung apakah perlu melakukan razia mengingat Kaltara merupakan wilayah perbatasan sehingga rentan terhadap barang-barang ilegal, dia mengatakan sangat perlu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat Kaltara tidak mengonsumsi barang-barang ilegal yang berbahaya bagi kesehatan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

TEWAS TAK WAJAR, MAKAM REMAJA DIBONGKAR UNTUK OTOPSI

BACA HALAMAN 2-3



**POLRES BONTANG TANGKAP 2
ORANG PENGETAP BBM BERSUBSIDI
DAN EMPAT OPERATOR SPBU**

BACA HALAMAN 29



Polisi dan keluarga bongkar makam remaja putri DA (16) untuk otopsi, Selasa (14/11) di TPU Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Tewas Tak Wajar, Makam Remaja Dibongkar untuk Otopsi

BALIKPAPAN - Polisi melakukan pembongkaran makam remaja di Balikpapan berinisial DA (16) yang dikabarkan meninggal dengan tak wajar, pada Selasa (14/11/2023). Dimana jenazah DA dimakamkan di TPU Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur.

Dari pantauan Mediakaltim.com di lokasi, makam DA tersebut baru sekitar 3 minggu. Dan terpaksa harus dilakukan pembongkaran untuk dilakukan otopsi pihak kepolisian.

Sejak sekitar pukul 09.00 Wita, makam DA tampak dikelilingi bilik pembatas berupa terpal yang disusun dengan formasi persegi panjang. Di dalam bilik, terlihat beberapa personel kepolisian, baik dari Polsek Balikpapan Timur hingga Unit Inafis Satreskrim Polresta Balikpapan.

Di sekitar makam juga terlihat anggota keluarga DA serta beberapa warga RT 24, Manggar, Balikpapan Timur. Hingga memasuki pukul 10.00 Wita, makam DA masih dalam proses

pembongkaran. Dimana prosesnya sedikit memakan waktu, mengingat kondisi tanah lempung yang sudah terlampau kering.

Diberitakan sebelumnya, polisi sedang menyelidiki kematian remaja DA (16) yang dianggap misterius di rumahnya. Keluarga melaporkan kematian setelah 8 hari, menyatakan kejang-gejala dan menolak otopsi. Meskipun tidak ada tanda kekerasan pada tubuh DA, polisi mengedukasi keluarga tentang pentingnya otopsi.

Kesulitan olah TKP membuat otopsi dianggap langkah pamungkas. Polisi menunggu persetujuan keluarga sebelum membongkar makam dan melakukan otopsi di RS Bhayangkara Balikpapan untuk mengungkap penyebab kematian yang mencurigakan.

"Tadi kita lakukan pemeriksaan menyeluruh, dari pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam," ujar Kasubdit Dokpol Bidokkes Polda Kaltim, AKBP dr I Gusti Gede Dharma usai pembongkaran.

Menurut Dharma, pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk mencari tanda-tanda kekerasan yang diduga menyebabkan kematian pada korban. Untuk pemeriksaan dalam, pihaknya melakukan pengambilan sampel toksikologi, seperti lambung, hati, ginjal, dan kandung kemih. Namun, pengambilan sampel darah dan urine tidak dilakukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan.

"Kalau lambung, seharusnya diambil organ beserta isinya. Cuma kebetulan isinya sudah kosong," jelasnya.

Selain itu, tim forensik juga membuka rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut korban untuk memeriksa apakah ada kekerasan. Secara umum, organ-organ ini sudah mengalami pembusukan. Hal itu, menurutnya, relatif menyulitkan proses pemeriksaan.

"Jadi belum selesai prosesnya. Kita masih menunggu pemeriksaan

toksikologi, menunggu pemeriksaan patologi anatomi, untuk melihat secara mikroskopik apakah pada organ dalam, ada kelainan tidaknya," tambah Dharma.

Sementara itu Kakak almarhum, Sisca (26) mengatakan, bahwa ia hanya ingin mencari titik terang dari kejadian tersebut. "Aku cuma ingin cari titik terang aja sih dari kejadian ini kan juga tiba-tiba bingung lah kita ini pihak keluarga," ujarnya.

Sisca menambahkan bahwa polisi telah mengambil HP almarhum untuk diselidiki. Ia berharap ada petunjuk yang bisa mengungkap penyebab kematian DA. Pasalnya, ia merasa bingung karena DA adalah seorang remaja yang aktif dan suka berinternetan, namun akses internet di rumahnya tiba-tiba terputus.

"Dari polisi baru aja kami kasih HP almarhum aja. Soalnya HP itu tiba-tiba terganti passwordnya, dan wifi dimatikan. Padahal dia nggak bisa hidup nggak ada internet," jelasnya.

Menurut Sisca, selain kondisi abnormal lebam-lebam, ada kemungkinan ada orang yang masuk ke rumah saat DA sendirian. Hanya saja saat itu tidak ada tetangga yang melihat kejadian tersebut.

"Kalau dari keluarga sendiri kecurigaannya ada orang masuk di rumah karena nggak ada juga keadaan sendiri di rumah. Juga waktu itu tetangga-tetangga juga mungkin tidak ada di situ. Jadi tidak tahu keja-

dian itu juga," tambahnya.

Sisca mengaku belum menduga siapa orang yang mungkin terlibat dalam kematian DA. Ia mengatakan bahwa sebelumnya DA tidak ada keluhan atau masalah dengan teman-temannya.

"Ya, itu sih belum menduga siapa orang yang masuk ke rumah. Karena kita juga belum tahu soalnya kan ini tiba-tiba juga. Sebelumnya tidak ada keluhan, nggak lagi berantem sama teman," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, remaja DA (16) ditemukan meninggal di Balikpapan pada 28 Oktober 2023, menimbulkan kecurigaan keluarga terkait tanda-tanda mencurigakan di tubuhnya. Meskipun keluarga membantah kemungkinan bunuh diri, hasil pemeriksaan medis menyatakan DA sehat.

Kejanggalan semakin bertambah saat jenazah dimandikan dan ditemukan lebam yang tidak sesuai dengan kondisi biasa setelah kematian. Keluarga mencoba otopsi untuk klarifikasi lebih lanjut, namun sempat kesulitan berkomunikasi dengan tim dokter yang merawat DA.

Meskipun ada indikasi kekerasan, pihak kepolisian sempat membantah adanya dugaan pembunuhan dan kematian DA tetap menjadi misteri. **(Bom)**

Penulis: Aprianto



Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun) **Rp** Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim disbud.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

DINAS PERKEBUNAN *Minggu Ke 1*
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *BULAN:*
November 2023

SIPASBUN
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	Indikasi Karet	
Karet	Rp.9.900 /kg K3 50-55%	Rp.12.700/Kilo	Indikasi Karet K3 100%	Rp.22.750/kg
Lada Putih	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 85%	Rp.19.337/kg
Kelapa Tua	Rp.5.700 / hj	Rp.2.200/hj	Indikasi Karet K3 50%	Rp.9.668/kg
Kelapa Muda	Rp.8.700 / hj	Rp.9.500 / hj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan Oktober 2023 Berdasarkan Umur Tanaman	
Biji Kakao	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg	Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.174,5/kg Naik Rp.17,8 atau 0,8% dari periode sebelumnya	
Gula Merah Aren	Rp.28.800 / kg	Rp.30.200 kg		

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

BerAKHLAK

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INFORMASI HARGA INDIKASI KARET
Tanggal 10 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini : 147,8 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran : RP.15.551
Harga Dasar / FOB : RP.22.984 X 85%
RP.19.536 **TURUN 0,2%**

KONDISI KARET

Harga	Harga / kg
Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Rp. 18.000 - Rp.19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 76%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 65% - 69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPD K3 60% - 64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPD K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (DARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

BerAKHLAK



RAFI'/MEDIA KALTIM

Proses pembukaan pelatihan jurnalistik keolahragaan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Tingkatkan Kapasitas Wartawan, Dispora Kukar Gelar Pelatihan Jurnalistik dan UKW

TENGGARONG-Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan jurnalistik keolahragaan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama tiga hari. Sejak tanggal 13-15 November 2023, di Ballroom Hotel Grand Fatma Tenggarong. Diikuti oleh puluhan wartawan yang berasal dari Kalimantan Timur (Kalim).

Dispora Kukar sendiri, menggaet pihak ketiga yang berasal dari Jakarta. Yakni menggandeng Pusdiklat Tribhuwana untuk pelatihan jurnalistik keolahragaan. Sebanyak dua narasumber yang dihadirkan, yang nantinya akan membahas teknik pemberitaan tentang olahraga.

"Mudahanlah dengan adanya pelatihan, para jurnalis ibaratnya bisa memanfaatkan ilmu yang digunakan

untuk keseharian dalam menulis berita," ujar Kasi Peningkatan Organisasi Olahraga Dispora Kukar, Beni Ariandi, Selasa (14/11/2023).

Sementara untuk UKW sendiri, melibatkan dua organisasi besar wartawan Indonesia. Yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim. Dengan total peserta sebanyak 53 wartawan dari Kaltim.

Ketua PWI Kukar, Bambang Irawan, pun mengapresiasi dan menyambut baik pelatihan jurnalistik keolahragaan dan UKW yang digelar oleh Dispora Kukar, melalui aspirasi Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono.

Tentunya dengan adanya pelatihan dan UKW ini, membuat wartawan di Kukar memiliki kompetensi. Karena dalam bekerja, wartawan merupakan

profesi yang harus memiliki kompetensi. "Kami harap semua dapat sertifikasi kompetensi, jadi ketika liputan tidak ada lagi wartawan yang belum kompeten," kata Bambang.

Namun ia pun berharap kerjasama antara PWI Kukar dan Dispora Kukar bisa terus berlanjut. Tidak hanya sebatas sertifikasi dan peningkatan kapasitas saja, namun seluruh kegiatan yang bersifat kewartawanan.

Diketahui, total 53 peserta yang mengikuti UKW. Masing-masing 36 wartawan dari PWI Kukar, yang terbagi dalam 24 wartawan kelas Muda, 6 wartawan kelas Madya dan 6 wartawan kelas Utama. Sementara dari IJTI Kaltim mengikuti 17 wartawan. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin saat ditemui.

DPRD PPU Dukung Pemkab Larang Kegiatan Dinas di Luar Daerah

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan kegiatan di luar PPU.

Hal ini mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin mengatakan bahwa kebijakan yang diambil merupakan terobosan baru yang baik untuk kemajuan PPU.

“Langkah Pj Bupati PPU yang melarang kegiatan pertemuan hingga pelaksanaan program yang di

jalankan oleh SKPD di luar dari PPU itu merupakan langkah yang baik dan patut kita apresiasi,” ucapnya, Sabtu, (11/11/2023).

Lanjutnya Raup, Ia mengatakan kebijakan atau langkah yang diambil memiliki alasan yang mendasar untuk kemajuan PPU, salah satu tujuannya yakni agar perputaran ekonomi tidak keluar dari PPU khususnya.

“Kegiatan apapun yang dilaksanakan wajib di wilayah sendiri. Kalau kita melakukan kegiatan di luar daerah, itu sama saja memperkaya Kabupaten atau Kota lainnya,”

tegasnya.

SKPD yang ingin melaksanakan kegiatan diminta dapat memanfaatkan potensi yang ada di PPU, sehingga Hotel dan Gedung Serbaguna maupun tempat wisata yang ada di PPU juga dapat dimaksimalkan dengan berkegiatan di PPU.

“Maka dari itu Kami sangat mengapresiasi yang menjadi kepentingan Daerah, harapannya kegiatan yang dilaksanakan dapat melibatkan pelaku usaha lokal agar perekonomian masyarakat berjalan,” pungkaskannya. (ADV/NRD)

Sujiati: Petani Babulu Minta Bendungan Telake Direalisasikan

PPU – Bendungan Telake di Kecamatan Longkali Paser dianggap perlu bagi para petani Babulu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati inginkan Pemerintah Daerah (Pemda) merealisasikan pembangunan Bendung Sungai Telake.

Selama ini para petani di dapilnya tersebut tidak maksimal lantaran irigasi pertanian yang ada tidak maksimal, solusi yang sangat tepat ialah merealisasikan bendungan Telake. “Bendung itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan para petani di Babulu,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Dalam pengolahan areal persawahan, masyarakat hanya mengandalkan air tadah hujan selama ini tanpa adanya bendungan yang dapat dimanfaatkan. “Kalau musim kemarau seperti saat ini lahan persawahan kering kerontang karena selama ini hanya mengandalkan air tadah hujan,” ungkapnya.

Lanjut Sujiati, ia tegaskan akan selalu memperjuangkan pembangunan Bendung Sungai Telake karena kehadirannya sangat dinantikan para petani Babulu.

Ia mengatakan bahwa permasalahan ini telah disampaikan ke Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Daerah berkali-kali. “Kami terus berupaya agar pengairan itu tetap terealisasi apalagi adanya IKN, sekali lagi DPRD PPU mendorong agar Pemerintah Daerah dapat merealisasikan sesegara mungkin,” tutupnya. (ADV/NRD)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Sujiati

Zainal Optimis Serapan APBD Maksimal Akhir 2023



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin saat diwawancarai

PPU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) optimis terhadap serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan maksimal hingga akhir tahun.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin menyakinkan bahwa penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir 2023. Faktanya, sebelum APBD Perubahan 2023 disahkan serapan anggaran telah mencapai 62 persen.

“Dari perkembangan yang ada, bahwa serapan anggaran sudah mencapai 62 persen. Karena adanya perubahan anggaran, kemajuan serapan terhitung menjadi 52 persen saja. Kami yakin anggaran akan terserap hingga akhir tahun sesuai dengan target yang diinginkan,” ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Lanjutnya Zainal, ia juga meminta SKPD di lingkungan PPU, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran 2023 hingga menyusul selisih 10 persen. Karena adanya anggaran perubahan tersebut.

Harapannya organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai memetakan kegiatan yang sudah masuk dalam dokumen perubahan. Agar pelaksanaannya dapat mempercepat serapan APBD 2023.

“Serapan anggaran sampai saat ini Kami kira masih dalam batas wajar dan masih ada waktu untuk memaksimalkannya, harapannya semangat SKPD saat ini dapat sangat menyelesaikan target yang dicapai,” pungkasnya. (ADV/NRD)



DWI

Anggota DPRD Bontang membahas terkait buaya Riska.

Bahas Pengembalian Buaya Riska, DPRD Bontang Gelar RDP dengan Pemkot Bontang dan BKSDA

BONTANG - DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkot Bontang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (14/11/2023).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris ini membahas wacana pengembalian buaya Riska ke habitatnya yakni Sungai Guntung. "Dalam pertemuan ini, kita membahas bersama terkait akan dikembalikannya buaya Riska. Kita bersama-sama membahas permasalahan ini, di mana permasalahan ini sudah sangat menyebar luas," pa-

parnya.

Dalam hal ini, Agus meminta pendapat dari pihak Pemkot Botang terkait bagaimana rencana kedepannya. Karena, jika berencana ingin membuat penangkaran tentunya bukan hanya masalah tempat yang dibutuhkan. Tetapi juga harus memperhatikan makanan, perawatan dan lain sebagainya. Pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kita tidak bisa hanya membahas tempat atau lokasinya saja, akan tetapi jika nantinya sudah menjadi penangkaran kita harus memikirkan lain-lainnya juga," tambahnya.

Untuk tempat, ada tiga pilihan loka-

si yakni Sungai Nyerakat di Bontang Lestari, Sungai Bontang Lestari, dan Sungai Guntung. "Intinya, untuk lokasi kita masih mempertimbangkan, belum dipastikan di mana jelasnya," bebernya.

Agus Haris juga menambahkan bahwa untuk kembalinya buaya Riska, semuanya harus dipersiapkan dengan matang, agar tidak ada kendala lagi yang terjadi. Semuanya harus siap. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



DWI

Para rombongan Komisi III melakukan sidak di perumahan Griya wisata Bontang Kuala.

Komisi III Minta Legalitas Fasum di Griya Wisata Bontang Kuala Segera Diselesaikan

BONTANG - Komisi III DPRD Bontang melakukan peninjauan langsung di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala, Selasa (14/11/2023). Dalam kunjungan tersebut, untuk menyelesaikan persoalan legalitas tanah yang berkaitan dengan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi mengungkapkan untuk pemenuhan fasum dan fasos sudah menjadi keluhan para warga sejak lama. Maka dari itu, pihaknya berharap permasalahan ini ingin cepat terselesaikan agar para warga tidak semakin banyak yang mengeluhkan terkait fasum dan fasos.

"Warga ini keluhannya apa, kan sudah disampaikan kemarin. Untuk listrik dan air tolong dituntaskan," ucapnya.

Padaحال usulan perbaikan fasum

dan fasos sudah masuk di Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, hingga DPRD. Adapun juga masalah terkait status legalitas musala juga masih menggantung, termasuk pembangunan jalan umum, serta drainase.

"Saya ingin ada solusi dari permasalahan itu semua. Kita ingin persoalan ini dikerahkan oleh pemerintah agar apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini bisa terwujud," paparnya.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Andi Ilham mengatakan belum adanya soslusi hingga saat ini karena terbentur dengan aturan.

"Jika perda sudah disahkan, semua perbaikan bisa berjalan. Kalaupun tahun ini sudah ada pengerjaan berupa perbaikan jalan," bebernya.

Pada kesempatan yang sama,

Yudha, salah satu perwakilan dari pengembang mengakui bahwa pihaknya mengalami kendala, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur sedang melakukan pengaturan tata ruang yang sudah ditandatangani.

"Adanya tata ruang tersebut kami tidak dapat memecah surat, sebab kawasan tersebut menjadi jalur hijau," ungkapnya.

Yudha juga menambahkan dengan surat izin yang telah dipegang, dengan berjalannya waktu pihaknya akan mengajukan permohonan agar pemecahan dapat dilakukan.

"Kami sudah melakukan penyerahan dokumen kepada DPKPP, jadi kami akan mengikuti mekanisme yang ada," tutupnya. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah

Dorong Pemerintah Cari Solusi Terhadap Dampak El Nino ke Sektor Pertanian

TANJUNG REDEB - Fenomena El Nino mengancam sektor pertanian di Kabupaten Berau. Dampaknya, belakangan ini produksi petani dikabarkan menurun.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah mengungkapkan, untuk mengatasi penurunan produksi petani akibat El Nino, pemerintah harus segera menyiapkan program alternatif.

"Program yang disiapkan harus dapat mengatasi masalah para petani yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian," tuturnya.

Dia mengatakan, untuk mengan-

tisipasi dampak El Nino yang dapat mengganggu ketahanan, dibutuhkan koordinasi dan sinergi semua pihak.

"Meski sudah ada program yang dibuat Kementan, tetapi program itu saya rasa belum cukup untuk mengatasi masalah petani. Buktinya, belakangan ini produksi petani kita menurun," bebernya.

Menurutnya, agar penurunan produksi padi teratasi, pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air.

"Misalnya mengadakan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air dari sumber-sum-

bernya. Hal itu sudah sebagai wujud pemerintah dalam membantu petani," jelasnya.

Kendati demikian, dirinya juga menyarankan pemerintah membuat sumur, bendungan atau mata air yang kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah.

"Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir," pungkasnya. (adv/dez)

Harap APBD Berau 2024 Dapat Selesaikan Masalah Dunia Pendidikan

TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2024 mendatang menyentuh Rp 4 triliun. Maka dari itu, sektor pendidikan harus lebih diperhatikan.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, cukup besarnya APBD 2024 nanti harus mampu menuntaskan permasalahan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal.

"Pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tetapi saya prihatin dengan kondisi pendidikan di beberapa kampung," ungkapnya.

Dia membeberkan, sektor pendidikan yang ada di wilayah pedalaman atau perkampungan Berau, memiliki sejumlah kekurangan. Seperti jumlah guru dan fasilitas yang kurang memadai.

"Saya harap Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten dapat memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai dunia pendidikan kita buruk," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini berharap, APBD Berau tahun 2024 mendatang membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. "APBD tersebut harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya. (adv/dez)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Imbau Orangtua Berikan Vaksin HPV ke Anak Perempuannya

TANJUNG REDEB - Pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak perempuan berusia 9 hingga 14 tahun sangat penting untuk mencegah serangan kanker serviks.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang mengungkapkan, orangtua harus memperhatikan kesehatan sang anak. Sehingga, vaksin harus diberikan sebelum terpapar virus HPV.

"HPV ini merupakan penyakit yang dapat menular. Jadi, saya imbau para orang tua untuk memberi vaksin terhadap anak perempuannya," ungkapnya.

Ia menilai, sosialisasi mengenai pentingnya vaksin HPV tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan (Nakes), tetapi juga pihak sekolah dan lembaga lainnya.

"Tetapi saya kira, lebih bagus jika semua masyarakat ikut menyampaikan informasi ke masyarakat. Khususnya yang masih ada salah pemikiran soal vaksin," ujarnya.

Salah satu lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menurut Ratna, UKS bisa menjadi medium untuk meluruskan informasi terkait vaksin HPV ke para siswa perempuan dan orangtua mereka.

Namun, Politikus Golkar ini berharap agar sosialisasi bisa dijalankan untuk semua pihak. Sebab dinilainya, masih sedikit yang mengetahui pentingnya vaksin HPV.

"Vaksin HPV ini sangat bermanfaat untuk mencegah kanker serviks yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Saya harap orangtua bisa sadar demi kesehatan anak-anak mereka," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

Ingatkan Bahaya TBC

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyakit Tuberkulosis (TBC).

Dia mengungkapkan, TBC merupakan penyakit menular yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Rudi mendorong pemerintah melakukan pencegahan dan pengobatan.

"Penyakit TBC ini bisa menimpa masyarakat dari berbagai kalangan. Jika salah satu anggota keluarga terkena TBC, secara perlahan-lahan ekonomi keluarga akan hancur, karena tidak bisa bekerja," katanya.

Menurut Politikus PDI-P ini, edukasi dari pemerintah sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini.

Ditambahkannya, pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan di tingkat bawah, seperti puskesmas, untuk membantu masyarakat yang terinfeksi penyakit TBC.

"Peran Puskesmas sangat penting. Obat TBC itu akan diberikan selama enam bulan, kemudian pemerintah akan mengontrol dampak positifnya," tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

Nilai Kualitas SDM Pengaruhi Angka Kemiskinan

TANJUNG REDEB - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Ia menuturkan, peningkatan SDM merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. "Jika SDM di suatu daerah baik, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan ikut baik," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, kemiskinan akan berdampak negatif ke beberapa hal, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas serta kerusakan lingkungan.

"SDM kita harus meningkatkan daya saing, agar tidak kalah dengan daerah lain. Pemerintah harus ikut andil mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan SDM sebagai kunci menghapus kemiskinan dan ketimpangan," ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Baik itu melalui membuka lapangan kerja dan sebagainya.

"Apalagi dengan adanya IKN ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya harap SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.

Kendati demikian, Syarifatul menganggap perlu keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan yang ada di Bumi Batiwakkal, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.

"Perusahaan yang ada juga harus konsisten memberi bantuan atau hak serupa terhadap masyarakat sekitarnya," pungkasnya. (adv/dez)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Dokter spesialis jantung saat memeriksa menggunakan alat USG jantung.

RSUD Bontang Miliki Alat Terbaru USG Jantung Portabel

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang memiliki alat GE LOGIQ e Ultrasound portabel untuk pemeriksaan Echocardiografi atau USG Jantung.

Dokter Spesialis Jantung RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP mengatakan fungsi alat USG jantung digunakan untuk melihat anatomis dan fungsional jantung. Ia mengatakan fungsional yang dimak-

sudkan yakni keberfungsian jantung.

“Alat ini bisa melihat fungsi-fungsi jantung,” kata dr. Suhardi kepada Media kaltim.com.

Selanjutnya, ia menyebutkan ada dua alat USG jantung selain di klinik jantung dan Instalasi Rawat Intensif. “Selain portabel ini, ada juga di klinik jantung yang digunakan,” kata dr. Suhardi.

Dijelaskan bahwa ketika ada temuan permasalahan melalui USG jantung maka dokter jantung akan melakukan tindakan lanjutan kepada pasien. “Jadi alat ini termasuk diagnostik bukan terapeutik,” ungkapnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Adv rsud

Pelaksanaan visite besar RSUD Bontang bersama dokter spesialis dan manajemen RSUD Bontang. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Visite Besar RSUD Taman Husada Bontang, Bentuk Monitoring Kasus Pasien hingga Fasilitas Rumah Sakit

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melaksanakan Visite Besar atau kegiatan untuk membahas kasus tertentu pada ruangan perawatan. Visite Besar juga dimaksudkan dalam peningkatan keilmuan untuk rumah sakit pendidikan.

Sekretaris Komite Medik RSUD Taman Husada Bontang, dr Shinta Fithri Hayati Azis, Sp.N mengatakan kegiatan Visite Besar sebagai kegiatan ilmiah yang rutin dilakukan setiap bulan satu kali pada minggu ke dua. Visite Besar juga dilakukan medical conferences dengan menjelaskan kasus-kasus pasien yang sedang ditangani.

“Ada kegiatan medical conferences yang dipresentasikan sesuai dengan kasus yang ditangani oleh dokter spesialis sebagai dokter pen-

anggung jawab. Ini juga sebagai update ilmu kedokteran,” jelasnya kepada Mediakaltim.com, Selasa (14/11/2023).

Visite Besar merupakan kegiatan yang dilakukan di semua ruangan di RSUD Bontang. Di mana dokter spesialis menjelaskan mengenai kasus pasien, terapi, kendala dan solusi.

“Semua dokter spesialis ikut, manajemen ikut bersama dokter umum. Membahas masalah kasus pasien yang dilakukan sebulan sekali,” katanya.

Dr Shinta mengatakan dengan kegiatan Visite Besar ini akan dapat mendiskusikan permasalahan hingga mendapatkan solusi dari setiap dokter spesialis dan manajemen.

“Ruangan-ruangan di RSUD semua akan dikunjungi dengan Visite Besar,” katanya.

Ia pun mengatakan dengan Visite Besar, dokter spesialis menjelaskan mengenai pasien-pasien yang membutuhkan perawatan lama dengan permasalahan kompleks hingga membutuhkan biaya banyak.

“Semua dibicarakan dan dibahas pada medical conferences,” sebutnya.

Sementara, Direktur RSUD Taman

Husada Bontang, dr Suhardi, Sp.JP mengatakan kegiatan Visite Besar merupakan pembahasan kasus tertentu di ruangan perawatan. Kegiatan dapat dilakukan rutin satu bulan sekali yang diikuti oleh komite medik (para dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi) bersama jajaran manajemen rumah sakit.

“Tujuan kegiatan selain membahas kasus, disampaikan pula permasalahan yang dapat saja muncul terkait pelayanan maupun fasilitas. Dengan adanya kehadiran bersama baik dari kalangan medis maupun dari manajemen tentunya akan dapat menemukan solusi bila terjadi permasalahan di unit perawatan terkait,” jelasnya.

Dr Suhardi mengatakan visite besar kali ini dilakukan di ruang Intensive Care Unit (ICU) yang membahas terkait pasien rujukan yang berasal dari rumah sakit di Sangatta yang rencana awal akan dirujuk ke RSUD AWS Samarinda namun terjadi kondisi buruk di perjalanan sehingga memilih ke rumah sakit terdekat yakni di RSUD Bontang. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

Rp488rb

nett/night

GRATIS WELCOME VOUCHER

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Ice Cream



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com

Bawaslu Turut Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Balikpapan

BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan saat ini turut melakukan penelusuran terhadap beredarnya potongan gambar berisi informasi penghimpunan masa yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari penelusuran yang dilakukan Panwascam Balikpapan Selatan.

"Saat ini Bawaslu Balikpapan masih menelusuri, kebetulan yang diduga salah satu ASN itu kan melakukan tindakan tidak netral. Prosesnya masih mengumpulkan data dan juga saksi," ujarnya, Selasa (14/11/2023).

Wasanti menjelaskan, bila informasi yang beredar di kolom komentar dan pesan whatsapp tersebut terbukti benar. Maka ada potensi pelanggaran yang dilakukan oknum ASN tersebut. Diantaranya, pelanggaran undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang netralitas ASN serta kode etik ASN yang tak memperbolehkan setiap ASN untuk berpihak pada para kandidat manapun dalam pesta demokrasi 2024 mendatang.

"ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. Baik itu kepala daerah maupun calon legislatif," jelasnya.

Menurutnya, tahapan penyelesaian pelanggaran tersebut bila terbukti benar maka akan dilakukan diluar dari Gakkumdu selaku eksekutor dalam menangani indikasi laporan tindak pidana pemilu. Namun pihaknya bisa memberikan berupa rekomendasi terhadap Komisi ASN (KASN).

"Belum sampai ke Gakkumdu kare-



Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti

na memang yang pertama ini belum masuk tahapan kampanye, jadi ini diluar masa kampanye. Pasti berupa rekomendasi ke KASN, karena ASN itu kan dibawah KASN, yang menindak itu nanti," tambahnya.

Sebelumnya, terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa membenarkan terkait isu yang beredar dimas-

yarakat tersebut. Persoalan tersebut menurutnya saat ini telah diserahkan sepenuhnya ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

"Biar diserahkan ke Inspektorat kan sekarang masih diteliti apakah benar atau tidak. Sementara sekarang masih ditangani Inspektorat," ujarnya. **(Bom)**

Penulis: Aprianto



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
J. Bigien Kusuma No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

KPUD Kubar. Anggaran NPHD untuk Pembiayaan dan Belanja Logistik Pilkada 2024

KUTAI BARAT - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) secara resmi mendapat hibah anggaran dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 22 miliar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabngpol) Kutai Barat untuk kegiatan Pilkada tahun 2024 mendatang.

Ketua KPU Kutai Barat Arkadius Hanye mengungkapkan bahwa anggaran tersebut sudah disepakati melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pekan lalu.

Dijelaskan, anggaran yang dibutuhkan KPU Kutai Barat sebenarnya mencapai Rp 39 miliar. "Akan tetapi ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda) hanya sebesar Rp 22 miliar sekian saja. Dana Rp 22 miliar itu hanya untuk pembiayaan operasional belanja logistik Pilkada 2024," jelasnya, Selasa (14/11/2023).

Selanjutnya, anggaran untuk honor panitia AdHoc akan ditanggung melalui anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sesuai dengan SK Gubernur Kaltim. Diketahui, anggaran tersebut dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. "Jadi KPU Kutai Barat mendapatkan dua kali anggaran," pungkasnya.



Ketua KPU Kutai Barat Arkadius Hanye

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
TOYOTA MOTOR OIL
Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE
Paling Hemat
GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Dandim 0912 Kab.Kutai Barat Letkol CZI Eko Handoyo

Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo Bakal Kunjungi Koramil Muara Pahu Terkait Persiapan Pengamanan Pemilu 2024

KUTAI BARAT - Komandan Distrik Militer Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat Letnan Kolonel (Letkol) CZI Eko Handoyo mengungkapkan bahwa ada agenda kunjungan kerja Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo ke Kabupaten Kutai Barat pada Rabu (15/11/2023).

"Kunjungan kali ini dalam rangka pengecekan personel satuan bawah dari Kodim hingga Koramil terkait persiapan pengamanan Pemilu 2024. Serta dalam rangka perbantuan kepada Polres Kutai Barat," ungkap Dandim 0912 Kubar Letkol CZI Eko Handoyo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/11/23).

Dandim menerangkan, kunjungan kerja tersebut berawal dari Kodim 0906 Kutai Kartanegara (Kukar), kemudian Koramil Kecamatan Kota Bangun, Koramil Kembang Janggut Kukar. Kemudian berlanjut ke Koramil Kecamatan Muara Pahu, Koramil Muara Lawa, Koramil Damai dan Koramil Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat.

Selama perjalanan dalam kunker tersebut, Danrem beserta rombongan dari Samarinda menuju Kutai Kartanegara dan ke Kutai Barat akan melalui jalan darat.

"Kemungkinan nanti pak Danrem bersama rombongan kembali ke Samarinda menggunakan transportasi air (sungai) speedboat," tutur Dandim.

Selain terkait kegiatan kunjungan kerja Danrem 091/

ASN, dia juga menyampaikan secara tegas tentang Neutralitas TNI pada pemilu 2024 sesuai amanat panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Yakni, ada 5 pokok yang wajib dipatuhi. Antara lain :

1. Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada parpol manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
2. Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
3. Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan meng-upload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survey.
5. Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Tim Gabungan Sita Makanan Kedaluwarsa dan Obat Ilegal di Kutai Barat

KUTAI BARAT - Sejumlah toko sembako dan apotek di Kutai Barat menjadi sasaran razia sejak pekan lalu. Razia ini dilakukan oleh Tim terpadu yang membidangi bagian Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kutai Barat bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda.

Hasilnya, tim gabungan yang dipimpin Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyita ratusan makanan kedaluwarsa serta obat-obatan dan kosmetik ilegal alias tak mengantongi izin edar.

"Kami sudah mendatangi 9 Kecamatan di Kutai Barat dan di lapangan itu kita masih menemukan barang-barang yang kadaluwarsa, kemudian obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Termasuk obat daftar G (Gevaarlijk atau obat berbahaya/keras) itu banyak sekali. Lalu kosmetik tanpa izin edar juga masih kita temukan dan sudah kita sita," kata Kepala bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kubar, Ambros Ndopo kepada pewartanya, Selasa (14/11/2023).

Ambros mengaku barang-barang yang disita itu akan dimusnahkan

bulan Desember mendatang, bersamaan dengan barang yang sempat disita awal tahun lalu.

"Nanti tanggal 8 Desember kita lakukan pemusnahan di Alun-Alun Itho. Yang jelas pengawasan obat dan makanan ini kita lakukan menjelang hari raya keagamaan yaitu natal dan tahun baru," ujarnya.

Ambros menyatakan pihaknya belum memberikan sanksi tegas kepada para penjual barang ilegal atau kedaluwarsa.

"Tetapi kita lakukan pembinaan dulu, nanti ada surat peringatan dari BBPOM bagi mereka yang kedapatan menjual barang kedaluwarsa dan tanpa izin edar," imbuhnya.

Dia juga mengimbau para pedagang selalu memperhatikan izin edar dan batas masa pemakaian barang sebelum dijual ke konsumen. Sebab barang-barang yang kedaluwarsa dan tidak ada izin edar apa lagi obat-obatan keras akan merugikan konsumen. Baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Selain itu produk yang tidak memiliki izin edar melanggar undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen.

"Makanya kami ingatkan ke pelaku usaha supaya memperhatikan ba-

rang dagangannya. Selalu dicek secara berkala supaya tidak kadaluwarsa kemudian jangan menjual obat-obatan yang seharusnya menggunakan resep dokter. Lalu kosmetik-kosmetik harus sesuai dengan izin dari balai POM. Obat keras daftar G yang dilarang beredar bebas itu harus diperhatikan," terang Ambros.

Terakhir dia meminta masyarakat lebih bijak dalam membeli produk di pasaran. "Jadilah konsumen bijak dengan mengecek batas pemakaian, izin edar dan kandungan setiap produk," pesannya.

Adapun tim terpadu pengawas konsumen itu melibatkan Polres Kutai Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BBPOM serta Disperindagkop UKM.

Kemudian itu dari 16 kecamatan se-Kutai Barat ada 9 kecamatan yang disidak petugas. Yakni kecamatan Damai, Tering, Barong Tongkok, Mook Manar Bulatn, Jempang, Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan dan kecamatan Sekolaq Darat.

Pewartanya : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman

Kapolres Kubar Sebut 587 Personel Siap Amankan Pemilu 2024

KUTAI BARAT - Kapolres Kutai Barat (Kubar) AKBP Heri Rusyaman mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pengamanan untuk menjaga agar Pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan damai.

Sedikitnya ada 587 personel akan diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi tahun depan di wilayah Kutai Barat.

Kapolres menjelaskan, dari 587 personel ini tentunya tidak semua diterjunkan untuk melakukan pengamanan di lapangan. Ada sekira 200-an personel di antaranya, sebut dia, akan melakukan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selebihnya akan menjadi personel cadangan, yang standby sewaktu-waktu dibutuhkan siap diterjunkan.

Dikatakannya, intensitas pengamanan akan semakin meningkat menjelang tahapan kampanye pada 28 November 2023 mendatang.

Bersamaan dengan itu juga, Ka-

polres mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk saling menjaga di lingkungan masing-masing. Dan yang terpenting, adalah warga diimbau untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax.

"Cek selalu kebenarannya, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang masih belum jelas," ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolres menambahkan, dalam hal pengamanan, Polres Kubar juga dibackup dari Polda Kaltim. Selain itu, Polres Kubar juga memetakan daerah rawan konflik pada Pemilu 2024.

Disebutkannya ada TPS yang dikategorikan rawan, sangat rawan dan kurang rawan. Ada 3 TPS yang dikategorikan sangat rawan. Hal ini, dengan pertimbangan melihat beberapa pengalaman kejadian pada Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang

dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoaks dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

"Oleh karena itu, masyarakat perlu mewaspadai berita-berita hoaks," tegas Kapolres.

Kapolres menjelaskan, melalui Operasi Mantab Brata Mahakam 2024 mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Sistem itu didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

"Kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Gandeng KPK, Pemkab Kutim Komitmen Tanggulangi Bahaya Korupsi

SANGATTA-Pembukaan sosialisasi anti korupsi dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju" digelar Pemkab Kutim bekerja sama dengan KPK RI di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Selasa (14/11/2023). Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Kutim Rizali Hadi, Kepala Inspektat Wilayah (Itwil) Kutim Hamdan, jajaran Forkopimda, Koordinator Pencegahan Wilayah IV KPK RI Rusfian, Kordinator Pencegahan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara KPK RI Tri Haryati dan sejumlah undangan yang hadir.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan jika

kegiatan ini merupakan inisiasi Itwil Kutim bekerja sama dengan KPK RI yang bertujuan sebagai sarana informasi kepada publik berkenaan pencegahan maupun pemberantasan korupsi.

"Korupsi permasalahan serius yang perlu diatasi sejak dini karena korupsi bisa masuk dari hal kecil dan dari berbagai kesempatan. Semua pihak harus waspada dan saling mengingatkan," tegasnya.

Kemudian, publik harus disadarkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dihadapi. Pekerjaan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata.

"Untuk itu strategi pencegahan korupsi diperlukan, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya

dapat ditutup rapat," ucapnya.

Dalam hal ini, Ardiansyah Sulaiman sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi anti korupsi ini guna melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kutim.

"Ini salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Maka harus memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah salah satu ancaman utama yang harus dihadapi," tegasnya.

Terakhir, Ardiansyah mengutarakan jika korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga sebuah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan, hak publik, dan keberlangsungan negara. (Rkt)

radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalkpapan.com

LPTQ Kutim Targetkan Naik Peringkat di MTQ 2025, Persiapkan TOT Calon Pelatih

SANGATTA - Training Of Trainer (ToT) untuk calon pelatih MTQ yang digelar oleh LPTQ Kutai Timur (Kutim) dibuka langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman di Q Hotel Sangatta, Senin (13/11/2023). Tampak hadir dalam pembuka, Kabag Kesra Setkab Kutim Sahman, Kasi Bimas Islam Kemenag Kutim Syarifuddin dan puluhan peserta dari perwakilan kecamatan se Kutim.

Dikatakan Bupati Ardiansyah Sulaiman, keputusan LPTQ belum lama ini di Balikpapan menyatakan tuan rumah MTQ Kaltim 2025 adalah Kutim. Juga 2024 IKN menjadi MTQ Nasional, maka Kaltim tak menggelar MTQ provinsi di 2024.

"Di sinilah kesempatan kita, mengundang para narasumber yang sudah melatih banyak pelatih di daerah.

Untuk menciptakan pelatih MTQ dari Kutim menatap MTQ di 2025 nanti," ucapnya.

Jadi, Ardiansyah berharap dengan adanya ToT yang digelar LPTQ ini, Kutim di 2025 bisa tampil percaya diri sebagai tuan rumah. Dengan konsep sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.

"Itu yang kita harapkan dan para peserta bisa memaksimalkan ilmu yang diberikan oleh narasumber atau pelatih nasional," ujarnya.

Terakhir, ia menargetkan peringkat Kutim di MTQ provinsi nanti bisa lebih meningkatkan dari perolehan tahun sebelumnya. Bukan hanya mencapai tiga besar tetapi kalau bisa juara umum.

Sebelumnya, Ketua Panitia ToT Sirajuddin mengatakan pelatihan ini

untuk meningkatkan kualitas pelatih, bukan hanya kualitas peserta. Karena hebatnya peserta diciptakan dari pelatih-pelatih yang andal.

"Mudah-mudahan dengan narasumber yang terbaik. Kutim bisa menciptakan pelatih yang terbaik juga," katanya.

Selanjutnya, peserta berasal dari semua kecamatan se-Kutim. Tiap kecamatan mengirimkan 3 sampai 5 orang mewakili pelatihan ini. Pelatihan pun digelar selama tiga dari Minggu (12/11/2023) sampai Rabu (15/11/2023) di Q Hotel Sangatta.

"Calon pelatih bakal dikelompokkan sesuai cabangnya seperti cabang Tilawah, Qirat, Syahril, Fahmi Quran, Khattil Quran, Tafsir, Tahfiz Quran, Hadist dan MKTIQ," terangnya. (Rkt)





Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi

Ketua DPRD Paser. Porkab Jadi Ajang Menyambut Porprov 2026

PASER - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi meminta agar para atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) ke-XVII Paser 2023 dapat menjaga sportivitas dan solidaritas.

"DPRD akan selalu mendukung penuh kegiatan Porkab yang diselenggarakan oleh KONI maupun Pemkab," kata Hendra Wahyudi, Senin (13/11/2023).

Hendra Wahyudi juga berharap, agar Porkab yang diikuti oleh 10 Kecamatan se-Kabupaten Paser ini menjadi momentum kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan multi cabang olahraga di Kabupaten Paser, termasuk dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 mendatang.

"Kegiatan itu menjadi pemantik semangat yang harus dijaga, sampai tahun-tahun berikutnya," kata politikus PKB itu.

Pasalnya, sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Porkab Kabupaten Paser turut dipertandingkan di Porprov Kaltim 2026 mendatang. Apalagi, Kabupaten Paser sudah ditetapkan sebagai tuan rumah pada ajang 4 tahunan itu.

"Mari kita jadikan kejuaraan itu sebagai ajang kebersamaan sebagai warga Paser, selain persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi pada 2026," katanya.

Untuk diketahui, Porkab Paser 2023 kali ini terselenggara setelah 11 tahun tidak pernah digelar. Adapun total yang terlibat mencapai 2.293 orang, di antaranya terdiri

1.868 orang atlet, 199 pelatih dan 226 official. Sementara ada 14 cabor dipertandingkan dalam porkab itu.

Cabor tersebut terdiri dari 13 cabang wajib seperti atletik, bola voli, bulu tangkis, dayung, pencak silat, sepakbola, tenis meja, basket, futsal, catur, pickleball, renang, karate, dan sepatu roda sebagai cabor eksibisi.

Terdapat pula tiga olahraga masyarakat yang dipertandingkan, yaitu senam kreasi, balogo, dan layang-layang khas. Namun jenis olahraga ini tidak masuk dalam kriteria perhitungan perolehan medali, tapi menjadi ajang kompetisi kreasi dengan penilaian tersendiri.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

Bawa Sabu 9,34 Gram, Pria di Samarinda Terancam 20 Tahun Penjara

SAMARINDA - Sat Resnarkoba Polresta Samarinda kembali berhasil melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan Hasan Basri, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda, Kopol Bambang Suhandoyo menjelaskan kronologis kejadian. Yakni, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 diterima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan

Hasan Basri, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

"Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 01.35 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang berada di dalam rumah yang berinisial AN (44)," terang Bambang.

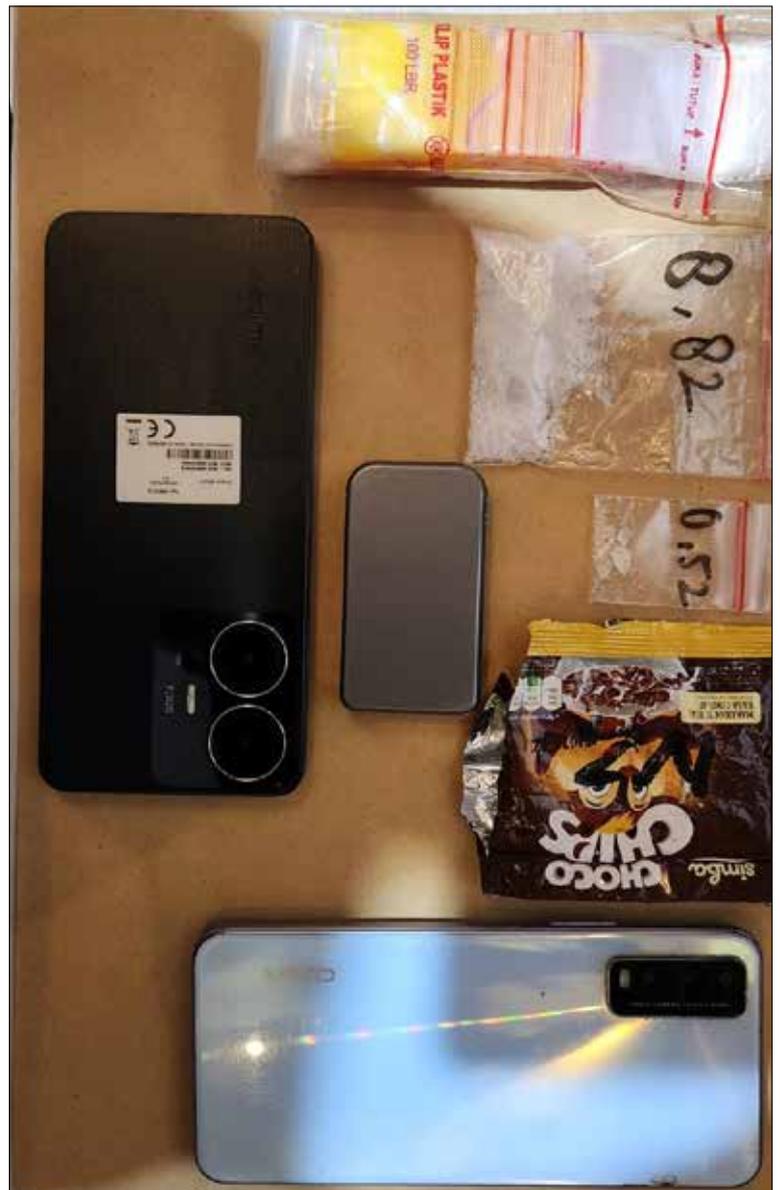
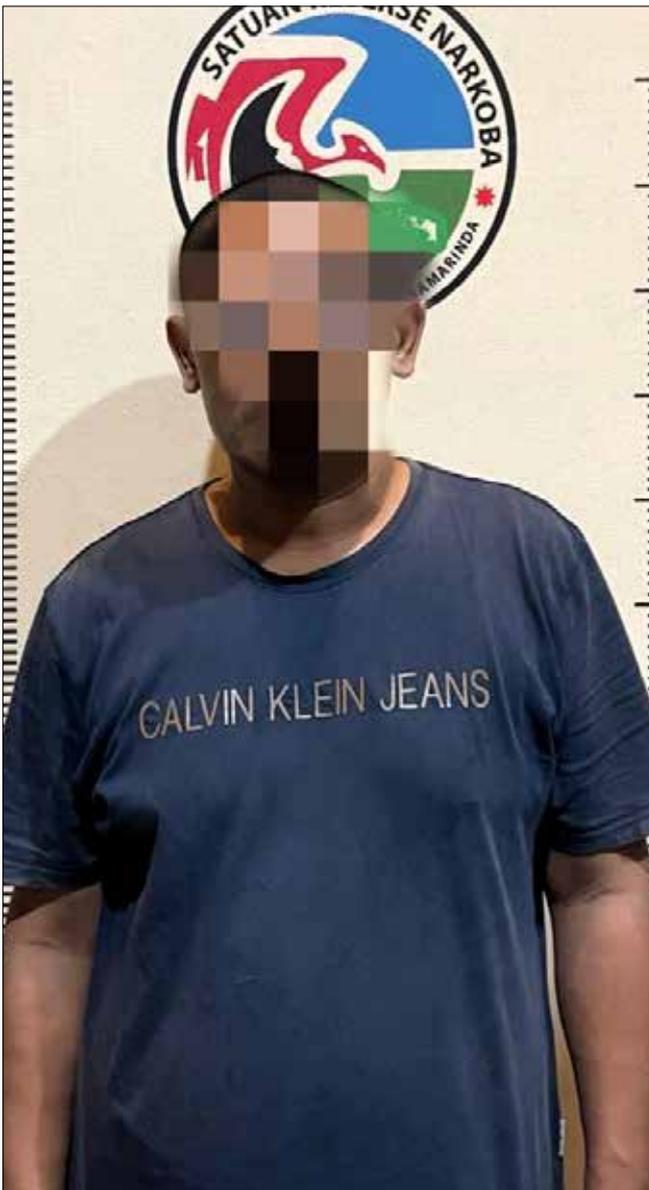
Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai barang bukti berupa 2 poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 9,34 gram bruto, 1 Unit timbangan digital, 1 bendel plastic

klip, 1 bungkus choko chips, dan 1 unit HP merk Vivo.

Selanjutnya pelaku AN beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsidi pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari





Sosialisasi Forkopimda, Kecamatan Samarinda Seberang Siap Sukseskan Pemilu 2024

SAMARINDA - Dalam rangka persiapan dan menyambut Pemilu 2024, Kecamatan Samarinda Seberang menggelar kegiatan sosialisasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kecamatan di Aula Kecamatan Samarinda Seberang pada Rabu (15/11/2023).

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi mengungkapkan bahwa kegiatan yang mengusung tema Menyukkseskan Pemilu 2024 ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait

pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita akan melaksanakan pemilu. Di mana, selama 90 hari kita masuk dalam tahapan pemilu," terang Aditya dalam sambutannya.

Dengan begitu, Aditya berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas di Kecamatan Samarinda Seberang. Terlebih, dapat mengantisipasi berita-berita hoax seputar Pemilu.

"Syukur hari ini kita dapat berkumpul. Diharapkan seluruh pihak untuk dapat menteralisir berita hoax. Kami

tidak memilih, namun apa yang terpilih nanti kami akan tetap seperti ini," tuturnya.

Diketahui, kegiatan ini turut dihadiri Danramil Samarinda Seberang, Mayor Inf. Sujadi, Kapolsek Samarinda Seberang, AKP Bitab Riyani S.H, Ketua PPK, Anshar, S.P.d.M.Pd, Ketua Panwascam dan para Lurah se-Kecamatan Samarinda Seberang. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari





ISTIMEWA/ MEDIA KALTIM

Barang bukti yang diamankan.

Usai Transaksi Narkoba, Seorang Wanita Dicidaduk Polisi di Tanjung Laut

BONTANG – Unit Reskrim Polsek Bontang Selatan, Polres Bontang menangkap seorang wanita berinisial N pada Selasa (14/11/2023) pukul 21.00 Wita. Pelaku N ditangkap di jalan Selat Malaka RT 10 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Humas Polres Bontang mengatakan N ditangkap sesaat setelah membuang bungkus yang diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya, atas dugaan itu, anggota personel memeriksa barang dan didapatkan barang bukti sabu di bungkus rokok.

“Dilakukan pemeriksaan isi dari bungkus rokok tersebut ditemukan satu buah plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,05

gram,” katanya, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, anggota personel mengamankan barang bukti satu buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 gram, satu buah handphone samsung warna hitam, satu buah plastik klip kecil kosong, dua lembar tisu warna putih, satu buah bungkus rokok Esse double warna hijau dan satu unit sepeda motor.

“Terduga dan semua barang bukti telah diamankan di kantor Polsek Bontang Selatan,” tambahnya.

Terduga pelaku kemudian dikenakan Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Pewarta : Yahya

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Kasat Reskrim, Iptu Hari Supranoto saat konferensi pers di Polres Bontang.

Polres Bontang Tangkap 2 Orang Pengetap BBM Bersubsidi dan Empat Operator SPBU

BONTANG – Polres Bontang mengungkapkan kasus pengetapan BBM bersubsidi pertalite di salah satu SPBU dan melakukan pemindahan BBM di jalan Imam Bonjol pada Sabtu (11/11/2023). Pengungkapan ini disampaikan di konferensi pers Polres Bontang, Rabu (15/11/2023) di Mako Polres Bontang.

Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto mengatakan Polres Bontang melakukan pengungkapan dilakukan atas penyelidikan personel Polres Bontang. Personel kemudian mengamankan 1 orang pengetap di SPBU MT Haryono dan tiga orang yang terlibat membantu dalam pengetapan.

“Polres Bontang menangkap satu pengetap dan tiga orang terlibat da-

lam pengetapan,” kata Iptu Hari Supranoto, Rabu (15/11/2023).

Selanjutnya, Ia mengatakan pengetap berinisial RS telah melakukan pengisian berulang kemudian memindahkan BBM ke wadah lainnya. Kemudian tiga orang lainnya berinisial WN, NA, dan SR sebagai pengawas SPBU membantu tersangka RS.

“Pengisian berulang oleh RS dalam satu waktu dan jam berbeda. Dia membawa tiga kartu barcode berbeda,” kata Iptu Hari Supranoto, Kasat Reskrim Polres Bontang.

Sementara lokasi ke dua, Polres Bontang menangkap MH pelaku pengetap di SPBU Kilometer 6 dan satu operator yang turut membantu.

“Lokasi ke dua di SPBU Kilometer 6. Diamankan MH dan satu operator

SPBU,” jelasnya.

Atas tindakan ini, para tersangka diamankan dan dikenakan pasal 40 angka 9 UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

“Dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp 60 milyar. Kami tidak tinggal diam pada pelaku pengetap BBM,” katanya. (yah)

Penulis: Yahya Yabo



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM